



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
DATA PRIORITAS KABUPATEN AGAM
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia;
- b. bahwa daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Data Prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Prioritas Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Data Prioritas Kabupaten Agam Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didapatkan dari Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data dan Forum Satu Data.
- KETIGA** : Data prioritas terdiri dari :
a. Indikator Kinerja Utama;
b. Indikator Kinerja Daerah; dan
c. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dibuat mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
DATA PRIORITAS KABUPATEN AGAM

DATA PRIORITAS KABUPATEN AGAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	DATA
Kelompok Misi 1 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani	
1	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Nilai SAKIP
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Nilai EPPD
5	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah
6	Indeks Profesionalitas ASN
7	Indeks SPBE
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
9	Tingkat Perkembangan Nagari
10	Indeks Pengelolaan Pemerintahan Nagari
Kelompok Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata	
1	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi
3	Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian (ADHK)
4	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro
5	Pertumbuhan realisasi investasi
6	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro
7	Laju pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)
8	Jumlah kunjungan wisatawan
9	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)
10	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap
11	Persentase peningkatan nilai realisasi Investasi.
Kelompok Misi 3 : Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana.	
1	Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah
2	Indeks kualitas lingkungan Hidup
3	Indeks ketaatan terhadap tata ruang
4	Persentase penanggulangan bencana terintegrasi
Kelompok Misi 4 : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkararakter	
1	Indeks Pembangunan Manusia
2	Angka Harapan Lama Sekolah
3	Rata-rata lama sekolah
4	Angka Harapan Hidup
5	Nilai produktivitas total daerah.
6	Tingkat Pengangguran Terbuka
7	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
8	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi yang dibina.
9	Indeks ketahanan pangan daerah
10	Indeks Kesejahteraan Rakyat

No.	DATA
11	Jumlah Nagari dengan status IDM Mandiri
12	Jumlah Nagari dengan status IDM Maju
13	Jumlah Nagari dengan status IDM Berkembang
14	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan social
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
16	Indeks Perlindungan Anak
17	Total Fertility Rate
Kelompok Misi 5 : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK	
1	Indeks Keamanan
2	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk
3	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan
4	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadaman kebakaran
5	Persentase Nagari Madani Level V
6	Jumlah Nagari Madani level : V
7	Jumlah Nagari Madani level : IV
8	Jumlah Nagari Madani level : III
9	Jumlah Nagari Madani level : II
10	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari
11	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan.

INDIKATOR KINERJA DAERAH

No.	DATA
A	Indikator Kinerja Makro
1	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
3	Indeks Gini (Gini Rasio)
4	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)
5	Persentase Penduduk Miskin
6	Tingkat pengangguran Terbuka (%)
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
B	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
I	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Pendidikan	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat
6	Angka Putus Sekolah SD/MI/ sederajat
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/ sederajat
8	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi
9	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi
10	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B
11	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B
12	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar
13	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan
14	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD
15	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6
16	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30
17	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30
18	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat
19	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat
20	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris
21	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris
Urusan Kesehatan	
1	Menurunnya rasio kematian ibu
2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun
3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
4	Menurunnya ratio kematian bayi
5	Persentase balita stunting
6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)
7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan
8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV
9	Insedensi TB per 100.000 penduduk
10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC
11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)
12	Treatmen coverage pada pasien TB
13	Cakupan Posbindu aktif
14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilen
15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai

No.	DATA
	standar
16	Perentase ketersediaan prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar
17	Persentase ketersediaan obat esensial Puskesmas
18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line
19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK
20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan
21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)
23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)
24	Persentase rumah tangga ber-PHBS
25	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar
26	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar
27	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar
28	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar
30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar
31	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar
32	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar
33	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar
34	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar
35	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar
36	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai Standar
37	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi
38	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)
39	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Persentase luas sawah beririgasi
2	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap
3	Persentase penduduk berakses air minum
4	Persentase rumah tangga berakses sanitasi
5	Persentase drainase kondisi baik
6	Persentase jalan lingkung kondisi baik
7	Persentase ketaatan terhadap tata ruang
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
9	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun
10	Persentase Bangunan yang tertata
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani
4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
2	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan
3	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran

No.	DATA
4	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan
5	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan
6	Persentase penanganan pra bencana
7	Persentase penanganan tanggap darurat bencana
8	Persentase penanganan pasca bencana
Urusan Sosial	
1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki
2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)
II.	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar
Urusan Ketenagakerjaan	
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja
2	Rasio penduduk yang bekerja.
3	Pencari Kerja yang ditempatkan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	IDG
2	Kecamatan Layak Anak
3	Nagari Layak Anak
Urusan Pangan	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3	Ketersediaan pangan utama
Urusan Pertanahan	
1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)
2	Jumlah bidang tanah yang diretribusi
3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah
4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah
Urusan Lingkungan Hidup	
1	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten
2	Rasio pejabat pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota
3	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
5	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota
6	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup
7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.
8	Persentase pengelolaan persampahan.
9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	
1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan

No.	DATA
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)
2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)
3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang
4	Persentase pengentasan desa tertinggal
Urusan Perhubungan	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum
	Rasio ijin trayek
	Jumlah uji kir angkutan umum
	Rasio Kejadian Kecelakaan
Urusan Komunikasi dan Informatika	
1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah
2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital
3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik
4	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi
5	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.
Urusan Koperasi dan UMKM	
1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas
2	Persentase BPR/LKM aktif
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif
Urusan Penanaman Modal	
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)
3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)
4	Persentase wirausahawan muda
Urusan Statistik	
1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
Urusan Persandian	
1	Indeks keamanan informasi
Urusan Kebudayaan	
1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari
2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan
3	Jumlah Pengunjung Museum
4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.
6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber

No.	DATA
	penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.
Urusan Perpustakaan	
1	Nilai Tingkat kegemaran membaca
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Urusan Kearsipan	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional
2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat
	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah
III	Urusan Pilihan
Urusan Kelautan dan Perikanan	
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB
2	Produksi perikanan tangkap (ton)
	Produksi perikanan budidaya (ton)
	Produksi benih ikan (juta ton)
	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)
	Cakupan Bina kelompok nelayan
	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)
	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton)
Urusan Pariwisata	
1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara
4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)
6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)
7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)
8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)
9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing
Urusan Pertanian	
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB
3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB
4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB
5	Produksi sektor pertanian:
	- Padi
	- Jagung
	- Cabe merah
	- Bawang merah
6	Produksi sektor peternakan (Ton):
	- Sapi
	- Kerbau
	- Kambing
	- Unggas
7	Produksi sektor perkebunan:
	- Kopi
	- tebu

No.	DATA
	- kulit manis
8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar
	- Padi
	- Jagung
9	Nilai Tukar Petani
10	Cakupan Bina kelompok tani
11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung):
	- Padi (%)
	- Jagung (%)
12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah):
	- cabe
	- bawang merah
13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan:
	- Kopi
	- tebu
	- kulit manis
14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan
15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT
16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular
Urusan Perdagangan	
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen
4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Urusan Perindustrian	
1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
3	Pertumbuhan industri
4	Cakupan Bina kelompok pengrajin
5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas
6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan
2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupaten
3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik
4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik
5	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik
6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD
Unsur Perencanaan	
1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Unsur Keuangan	
1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
3	Kesesuaian pengalokasian anggaran
4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)

No.	DATA
5	Opini BPK terhadap LKPD
6	Manajemen Aset
7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes
Unsur Kepegawaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Unsur Penelitian dan Pengembangan	
1	Indeks Kinerja Kelitbangan
2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan
3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kec, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
2	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)
3	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi
Unsur Kewilayahan	
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
	Unsur Pemerintahan Umum
	Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.
	Transparansi dan Partisipasi Publik
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)
2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No.	DATA
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SI/MI/Sederajat
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
13	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
14	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan non PLN.
15	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
16	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
17	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
18	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
19	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana).
20	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
21	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
22	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
23	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
24	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
25	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
26	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
27	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
28	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
29	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

No.	DATA
30	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
31	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
32	Prevalensi anemia pada ibu hamil.
33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
34	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
35	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
36	Angka Kematian Ibu (AKI).
37	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
38	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
39	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
40	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
41	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
42	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
43	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
44	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
45	Kejadian Malaria per 1000 orang.
46	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)
47	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 37)
48	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
49	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.
50	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
51	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
52	Prevalensi tekanan darah tinggi.
53	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
54	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
55	Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
56	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
57	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir
58	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
59	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

No.	DATA
60	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
61	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
62	Total Fertility Rate (TFR)
63	Unmet need pelayanan kesehatan.
64	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
65	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
66	Proporsi kematian akibat keracunan.
67	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
68	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
69	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
70	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,
71	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
72	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
73	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
74	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
75	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
76	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
77	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
78	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi
79	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
80	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
81	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
82	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
83	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
84	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
85	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
86	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
87	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

No.	DATA
88	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
89	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
90	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
91	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
92	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
93	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
94	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
95	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
96	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
97	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
98	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
99	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
100	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
101	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
102	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
103	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
104	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
105	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
106	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
107	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
108	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
109	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.
110	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
111	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
112	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau

No.	DATA
113	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
114	Laju pertumbuhan PDB per kapita
115	PDB per kapita.
116	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
117	Persentase tenaga kerja formal.
118	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
119	Tingkat setengah pengangguran
120	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
121	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
122	Jumlah wisatawan mancanegara.
123	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara.
124	Jumlah devisa sektor pariwisata.
125	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
126	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
127	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
128	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
129	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita
130	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
131	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
132	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
133	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
134	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
135	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
136	Proporsi individu yang menggunakan internet
137	Koefisien Gini.
138	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
139	Jumlah Desa Mandiri.
140	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas
141	Indeks Kebebasan Sipil.
142	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
143	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
144	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
145	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
146	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil
147	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
148	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

No.	DATA
149	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
150	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
151	Persentase sampah perkotaan yang tertangani
152	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
152	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
154	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang
155	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
156	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
157	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
158	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
159	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
160	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
161	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
162	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata
163	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
164	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
165	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
166	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
167	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
168	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
169	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
170	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18- 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
171	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
172	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
173	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).
174	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).
175	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan
176	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

No.	DATA
177	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator Lokal ; Indeks kepatuhan pelayanan publik
178	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
179	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
180	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
181	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
182	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
183	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
184	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
185	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
186	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
187	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
188	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
189	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
190	Proporsi individu yang menggunakan internet
190	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
191	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
192	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik
193	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
194	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
195	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
196	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
197	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
198	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).
199	Laju Pertumbuhan Penduduk
200	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)
201	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
202	Tingkat Kemiskinan (%)

No.	DATA
203	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
204	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)
205	Rasio PDRB Industri Pengolahan
206	Rasio PDRB Akomodasi Mamin
207	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)
208	Proporsi jumlah UKM non pertanian
209	Proporsi jumlah IKM
210	Rasio Kewirausahaan
211	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB
212	ROA BUMD
213	Tingkat Pengangguran Terbuka
214	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
215	Indek Inovasi Daerah
216	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
217	Indeks Kemahalan Konstruksi
218	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
219	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
220	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
221	Indeks Reformasi Hukum
222	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
223	Indeks Pelayanan Publik
224	Indeks SPI
225	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti
226	Persepsi Korupsi IPAK
227	Konflik sosial yang dapat diatasi
228	Proporsi Penduduk yg Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya
229	Indeks Demokrasi Indonesia
230	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
231	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB
232	Aset Dana Pensiun/PDRB
233	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan
234	Total Kredit/PDRB
235	Tingkat Inklusi keuangan Kabupaten
236	Persentase lembaga adat yang menegakkan adat salingka nagari
237	Level Nagari Madani
238	Indeks Pembangunan Keluarga
239	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
240	Indeks Perlindungan Anak
241	Persentase Program Konservasi yang direncanakan dan terlaksana tepat waktu
242	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
243	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
244	RT dengan Akses Sanitasi Aman
245	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
246	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
247	Konsumsi listrik per kapita
248	Kapasitas Air Baku (m3/detik)

No.	DATA
249	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman

